

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MAKASSAR 2018

WELFARE OF MAKASSAR MUNICIPALITY 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR**

**INDIKATOR KESEJAHTARAAN RAKYAT
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2018**

**No Publikasi : 71520.1503
Katalog : 4101004.71
Ukuran Buku : 8,5" x 11"**

**Pembina : Kepala BPS Kota Makassar
Pengarah : Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

Tim Penyusun : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Gambar Kulit : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Lay Out : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR
Jl. Abdurahman Basalamah I Makassar 90231
Telp. 0411 442698
Fax. 0411 442698
e-mail: bps7371@bps.go.id
Homepage: <http://makassarkota.bps.go.id>**

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2018 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.

Kami menyadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menganalisis dan merencanakan berbagai kegiatan untuk pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Makassar, November 2019

Badan Pusat Statistik

Kota Makassar

Kepala,

Ir. Ari Prihandini, M. Si

NIP. 196802221994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	x
ISTILAH TEKHNIS.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. RuangLingkup	2
1.4. Konsep dan Defenisi.....	3
1.5. Sumber Data	5
1.6. Sistimatika Penulisan	6
BAB II KEPENDUDUKAN	7
2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	7
2.2. Pertumbuhan Penduduk.....	9
2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk.....	9
2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan	12
2.5. Sex Ratio	14
2.6. Status Perkawinan	15
BAB. III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	17
3.1. Usia Perkawinan Pertama.....	17
3.2. Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup	19
BAB IV KESEHATAN	22
4.1. Status Kesehatan Masyarakat	22
4.2. Keluhan Kesehatan.....	23
4.3. Lama Hari Sakit.....	23
4.4. Penolong Persalinan.....	24
4.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI).....	25
4.6. Sarana Kesehatan	26

BAB V	PENDIDIKAN	28
	5.1. Sarana Pendidikan	28
	5.2. Rasio Murid Guru	29
	5.3. Rasio Murid Sekolah	30
	5.4. Angka Partisipasi Sekolah	33
	5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf)	34
	5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki	36
BAB VI	KETENAGAKERJAAN	38
	6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	39
	6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	39
	6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan	41
	6.4. Status Pekerjaan	42
	6.5. Lama Jam Bekerja	44
BAB VII	PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	45
	7.1. Status Penguasaan Rumah	45
	7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal	46
	7.3. Fasilitas Tempat Tinggal	51
BAB VIII	INDIKATOR LAINNYA	55
	8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita	55
	8.2. Kemiskinan	56
	DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penduduk Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018	8
Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan Tahun 2017 dan 2018	9
Tabel 2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2018	11
Tabel 2.4 Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2017 – 2018 (%)	13
Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Makassar 2017-2018	14
Tabel 2.6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Kota Makassar 2017-2018	16
Tabel 3.1 Persentase Wanita Usia 10 tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) di Kota Makassar 2016 - 2017	19
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Menikah menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2017-2018	20
Tabel 3.3 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2016 - 2017	21
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan 2016 - 2017	23
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Penderita Sakit menurut Jumlah Hari Sakit Kota Makassar, 2017	24
Tabel 4.3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut Penolong kelahiran anak yang terakhir di Kota Makassar 2016–2017	25
Tabel 4.4 Persentase Anak Berusia Kurang dari 2 tahun yang pernah Disusui Menurut Lama Disusui Kota Makassar 2017	26
Tabel 4.5 Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2018	27
Tabel 5.1 Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019	29
Tabel 5.2 Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019	30

Tabel 5.3 Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2018	31
Tabel 5.4 Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2018	32
Tabel 5.5 Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun Kota Makassar 2017 – 2018	33
Tabel 5.6 Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Kota Makassar 2017 – 2018	35
Tabel 5.7 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2018	36
Tabel 6.1 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018	39
Tabel 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018	40
Tabel 6.3 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Makassar Tahun 2018	41
Tabel 6.4 Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama seminggu Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar Tahun 2018	42
Tabel 6.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar Tahun 2018	43
Tabel 6.6 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar Tahun 2018	44
Tabel 7.1 Rumahtangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kota Makassar, 2017 – 2018	46
Tabel 7.2 Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018	47
Tabel 7.3 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Makassar Tahun 2018	48
Tabel 7.4 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2017 - 2018	50
Tabel 7.5 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar Tahun 2017-2018	52

Tabel 7.6 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Makassar Tahun 2017-2018.....	53
Tabel 7.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018	54
Tabel 8.1 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kota Makassar Tahun 2018	55
Tabel 8.2 Pengeluaran perkapita sebulan dan pola konsumsi di Kota Makassar Tahun 2017-2018.....	56
Tabel 8.2 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2016 – 2018	58

<https://makassarkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 dan 2018	8
Grafik 2. Distribusi Penduduk Kota Makassar per Kecamatan Tahun 2018 ...	12
Grafik 3. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama Tahun 2018	18
Grafik 4 Persentase Penduuduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2018.....	37
Grafik 5 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Kota Makassar Tahun 2018.....	48
Grafik 6 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar Tahun 2018.....	49
Grafik 7 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018.....	50
Grafik 8 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018.....	52
Grafik 9 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018.....	54
Grafik 10 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar Tahun 2012-2018	59

ISTILAH TEKHNIS

Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dengan menggunakan rumus eksponensial.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi

Rasio Dan Jenis Kelamin

Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan dikalikan 100.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Besarnya probabilita bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan per seribu kelahiran).

Angka Harapan Hidup (AHH) Pada Waktu Lahir

Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berusia 10 tahun keatas.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu

memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun keatas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Dependency Ratio/Angka Beban Tanggungan (ABT).

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan 64 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 tahun sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Ukuran tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batas usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Angka Buta Huruf

Ukuran persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencukupi kebutuhan yang bersifat materiil (sandang, papan dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat nonmateriil (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Disisi lain sumber daya manusia dalam proses pembangunan dapat menjadi potensi dapat pula menjadi beban pembangunan.

Sejalan dengan pergantian masa dan kepemimpinan, apalagi sejak diterapkannya Undang- undang Otonomi Daerah telah mengubah sistem kebijakan negara ini dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan apakah dengan desentralisasi akan menjamin bahwa kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi. Pertanyaan ini akan terjawab bila ada kesepakatan nasional untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan nasional. Dimana kesepakatan itu menjamin bahwa semua rakyat Indonesia sebagai warga negara berhak atas standar pembangunan manusia, seperti baca tulis, mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya, hidup sehat, berprestasi yang layak, menghuni rumah yang memadai, beribadah dengan tenang sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa dengan damai dan nyaman.

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya, dan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan untuk melihat

keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Di sinilah peran serta BPS, khususnya dalam menyediakan data-data statistik yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kemampuan daya beli masyarakat.

1.2. Tujuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2018 diterbitkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kebutuhan data guna pengukuran tingkat pembangunan di Kota Makassar. Publikasi ini berisi kumpulan indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Disamping itu, gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan, yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan (rencana pembangunan pada masa yang akan datang).

1.3. RuangLingkup

Aspek kesejahteraan disadari memiliki dimensi yang sangat luas, tidak terbatas hanya menyangkut aspek materi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Karenanya guna melihat perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat perlu adanya fokus perhatian pada suatu indikator sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang perkembangan tersebut. Dengan memperhatikan fokus dan pembatasan masalah, yang dicakup dalam indikator kesejahteraan ini meliputi aspek-aspek kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,

perumahan dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Indikator menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: indikator masukan, indikator proses dan indikator keluaran/dampak. Dalam publikasi ini ketiga indikator tersebut disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Makassar, sementara beberapa indikator yang disajikan pada tingkat kecamatan.

1.4. Konsep dan Defenisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

Adapun konsep dan defenisi tersebut adalah:

Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Rumah Tangga Khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

Kepadatan penduduk adalah rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100.

Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah

tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Metode Kontrasepsi adalah alat/cara pencegah kehamilan.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak atau Belum Pernah Sekolah adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat. Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

Tidak Sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Melek Huruf adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Angka partisipasi Sekolah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Bekerja adalah Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Menganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja.

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti, dan sedang

menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan tersebut (angkatan kerja) dibandingkan dengan penduduk usia 15 tahun keatas.

$$TPAK = \frac{AK}{P_{15+}} \times 100$$

Keterangan: AK = Angkatan Kerja
P₁₅₊ = Penduduk usia 15 tahun keatas

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{TM}{AK} \times 100\%$$

Keterangan: PT = Tingkat Pengangguran Terbuka
TM = Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan
AK = Jumlah Angkatan Kerja

Angka Beban Tanggungan adalah Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

Penduduk Muda adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

Penduduk Tua adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

1.5. Sumber Data

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi rumah tangga.

Untuk itu, data Susenas sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumahtangga yang menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan defenisi, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang hal-hal kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu perkembangan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, perkawinan dan rumahtangga, feritlitas dan keluarga berencana.

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan mengenai kesehatan, yang meliputi sarana kesehatan, keluhan kesehatan, penolong persalinan, serta pemberian ASI.

Bab keempat, dibahas kondisi pendidikan yang mencakup sarana pendidikan, rasio murid-guru, rasio murid sekolah, angka partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Bab kelima, digambarkan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup penduduk menurut jenis kegiatan, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, lapangan usaha, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.

Bab keenam, merupakan bab yang membahas tingkat sosial yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

Bab ketujuh, merupakan bab terakhir yang memberikan gambaran yang menyangkut ekonomi rumahtangga yang mencakup pengeluaran rumahtangga menurut golongan pengeluaran.

BAB II

KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Sementara itu, perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan maupun pelaku bisnis.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekrutmen pekerja/karyawan. Dalam berbagai pihak, bagi lembaga swasta nonprofit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh sebab itu dalam bab ini akan disajikan tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin dan status perkawinan.

2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2018 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1.508.154 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 746.951 jiwa dan perempuan 761.203 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,13. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk ini tersebar

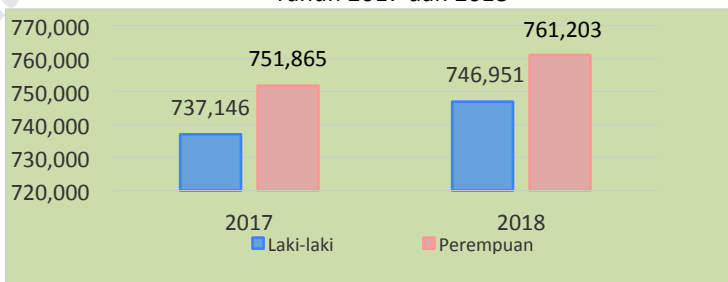
pada 15 kecamatan terdiri dari 153 kelurahan dengan total luas 175,77 km², sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2018 sekitar 8.580 jiwa per km². Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang hanya mencapai 8.471 jiwa per km².

Tabel 2.1
Penduduk Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018

Uraian	Tahun	
	2017	2018
Jumlah Penduduk	1.489.011 jiwa	1.508.154 jiwa
- Laki-laki	736.912 jiwa	746.951 jiwa
- Perempuan	752.099 jiwa	761.203 jiwa
Rasio Jenis Kelamin	97,98	98,13
Kepadatan penduduk	8.471 jiwa/km ²	8.580 jiwa/ km ²

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Tahun 2017-2018

Grafik 1
Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017 dan 2018



2.2. Pertumbuhan Penduduk

Usaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk selalu menjurus kepada pengkajian bagaimana cara menurunkan tingkat fertilitas, sebab upaya ini merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap banyaknya penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar untuk periode 2018 sebesar 1,31 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk untuk provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebesar 0,94 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 1.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan
Tahun 2017 dan 2018

wilayah	2017	2018	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Makassar	1.489.011 jiwa	1.508.504 jiwa	1,31
Provinsi Sulawesi Selatan	8.690.294 jiwa	8.771.970 jiwa	0,94

Sumber: Makassar Dalam Angka 2018, BPS

2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya. Apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Ukuran sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah.

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2018 tercatat 1.508.154 jiwa yang tersebar pada 15 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan keadaan sebaran yang tidak merata.

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 8.580 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.602 jiwa/km² di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 33.854 jiwa/km² di Kecamatan Makassar.

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat tujuh kecamatan lainnya yang memiliki luas wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar berturut-turut adalah Biringkanaya 48,22 Km², Tamalanrea 31,84 Km², Manggala 24,14 Km² dan Tamalate 20,21 Km².

Tabel 2.3 menunjukkan distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sebesar 14,22 persen, Tamalate 13,39 persen, Rappocini 11,16 persen dan Kecamatan Panakkukang sebesar 9,88 persen.

Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi.

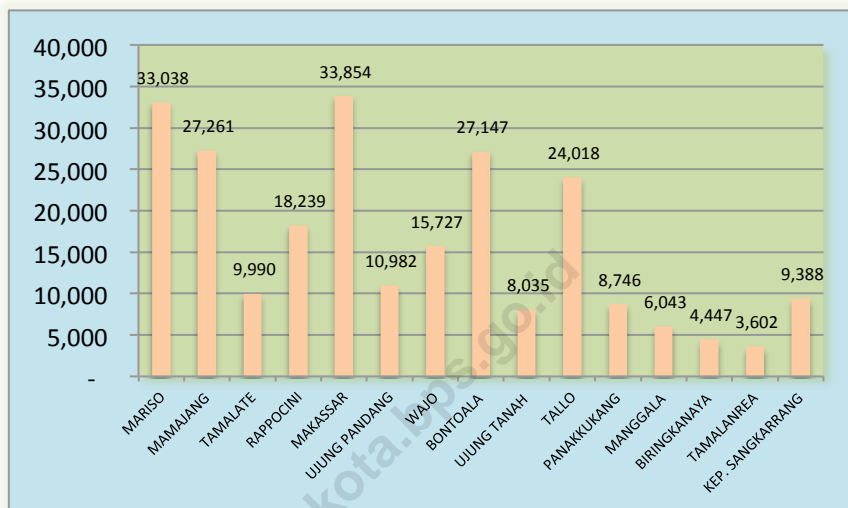
Tabel 2.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	Penduduk	(%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mariso	1,82	1,04	60,130	3.99	33,038
02. Mamajang	2,25	1,28	61,338	4.07	27,261
03. Tamalate	20,21	11,50	201,908	13.39	9,990
04. Rappocini	9,23	5,25	168,345	11.16	18,239
05. Makassar	2,52	1,43	85,311	5.66	33,854
06. Ujung Pandang	2,63	1,50	28,883	1.92	10,982
07. Wajo	1,99	1,13	31,297	2.08	15,727
08. Bontoala	2,10	1,19	57,009	3.78	27,147
09. Ujung Tanah	4,40	2,50	35,354	2.34	8,035
10. Tallo	5,83	3,32	140,023	9.28	24,018
11. Panakkukang	17,05	9,70	149,121	9.89	8,746
12. Manggala	24,14	13,73	145,873	9.67	6,043
13. Biringkaya	48,22	27,43	214,432	14.22	4,447
14. Tamalanrea	31,84	18,11	114,672	7.60	3,602
15. Sangkarrang	1,54	0,88	14,458	0.96	9,388
Jumlah	175,77	100,00	1,508,154	100.00	8,580

Sumber: Makassar Dalam Angka 2018, BPS

Untuk itu sangatlah logis apabila pengembangan wilayah pemukiman penduduk dapat diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, seperti pada kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala.

Grafik 2
Distribusi Penduduk Kota Makassar per kecamatan Tahun 2018



Sumber: Makassar Dalam Angka 2018, BPS

2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan

Selain jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, indikator lainnya yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Indikator ini menjadi penting sebagai petunjuk perkembangan taraf kesejahteraan karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kejadian kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

Dengan mengetahui struktur umur penduduk, kita dapat mengukur besarnya dependency ratio (Angka Beban Ketergantungan), yang selanjutnya disebut “beban ketergantungan”. Beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut.

Dari tabel 2.4 di bawah ini memperlihatkan beban ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2017 sebesar 44,29 dan turun menjadi 41,22 pada tahun 2018. Angka tersebut pada tahun 2017 memberikan gambaran bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kota Makassar harus menanggung secara ekonomis sekitar 41 penduduk usia tidak produktif. Turunnya angka beban ketergantungan pada tahun 2018 disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun dan menurunnya jumlah penduduk berusia 0-4 th.

Tabel 2.4
Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2017 – 2018 (%)

Angka Beban Ketergantungan	2017			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Muda (0-14 thn /15-64 thn)	41,06	36,53	38,75	37,04	34,71	35,86
Penduduk Tua (65+ /15-64 thn)	5,23	5,84	5,54	4,52	6,18	5,36
Total	46,29	42,37	44,29	41,56	40,89	41,22

Sumber: Makassar Dalam Angka 2018, BPS

Jika usia tidak produktif dibedakan antara usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (usia 65+), maka angka beban tanggungan dibedakan menjadi angka beban tanggungan penduduk muda dan angka beban tanggungan penduduk tua. Dalam kurun 2017-2018 angka beban tanggungan penduduk muda mengalami

penurunan sebesar 2,89 poin. Sementara itu, angka beban tanggungan penduduk tua mengalami penurunan sebesar 0,18 poin. Namun demikian, penduduk muda masih dominan sebagai beban tanggungan penduduk usia produktif, karena angka beban tanggungan penduduk tua relatif kecil, yaitu 5,54 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 5,36.

2.5. Sex Ratio

Sex Ratio (ratio jenis kelamin) penduduk Kota Makassar pada tahun 2018 sebesar 98,13, artinya di Kota Makassar terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-14 tahun sex rasionya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok umur/usia sedang (15-64) dan kelompok penduduk tua (65+) sex rasionya dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.5

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Makassar 2017-2018

Kelompok Umur	2017			2018		
	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	74.073	67.173	110,27	70.610	67.533	104,56
5 - 14	146.459	137.402	106,59	124.852	119.981	104,06
15 - 64	477.451	496.480	96,16	527.664	540.293	97,66
65 +	38.929	51.044	76,26	23.825	33.396	71,34
Total	736.912	752.099	97,98	746.951	761.203	98,13

Sumber: Makassar Dalam Angka 2018, BPS

Pola yang terbentuk dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin penduduk usia dewasa lebih rendah dari penduduk usia muda. Atau dengan kata lain, pada kelompok usia muda jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sedangkan pada kelompok usia dewasa,

jumlah laki-lakinya lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi dan rendahnya tingkat harapan hidup penduduk laki-laki dibanding perempuan.

2.6. Status Perkawinan

Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak dan ditandai dengan adanya hubungan darah. Namun karena suatu hal, adakalanya keluarga dapat hanya terdiri dari suami-isteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak.

Status perkawinan dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan, kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati.

Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

Pada Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas tahun 2017 dan 2018. Nampak bahwa proporsi penduduk berstatus kawin mengalami penurunan sebesar 1,78 persen selama tahun 2017-2018, yaitu dari 50,77 persen menjadi 48,99 persen. Persentase status perkawinan cerai hidup mengalami penurunan sebesar 0,37 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang berstatus kawin mengalami penurunan sebesar 2,73 persen. Demikian pula halnya penduduk perempuan mengalami penurunan sebesar 0,88 persen. Selama tahun 2017-2018, angka perceraian (cerai mati dan cerai hidup) di Kota Makassar turun sebesar 0,14 persen.

Angka cerai mati penduduk perempuan baik ditahun 2017 maupun ditahun 2018 selalu jauh lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih bertahan untuk tidak menikah ketika berstatus cerai mati dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.6
 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan
 Kota Makassar 2017-2018

Status Perkawinan	2017			2018		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	45,09	39,69	42,32	46,70	39,90	43,25
Kawin	52,01	49,60	50,77	49,28	48,72	48,99
Cerai Hidup	1,46	3,71	2,61	1,61	2,85	2,24
Cerai Mati	1,44	7,00	4,29	2,42	8,52	5,52

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017-2018

BAB. III

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

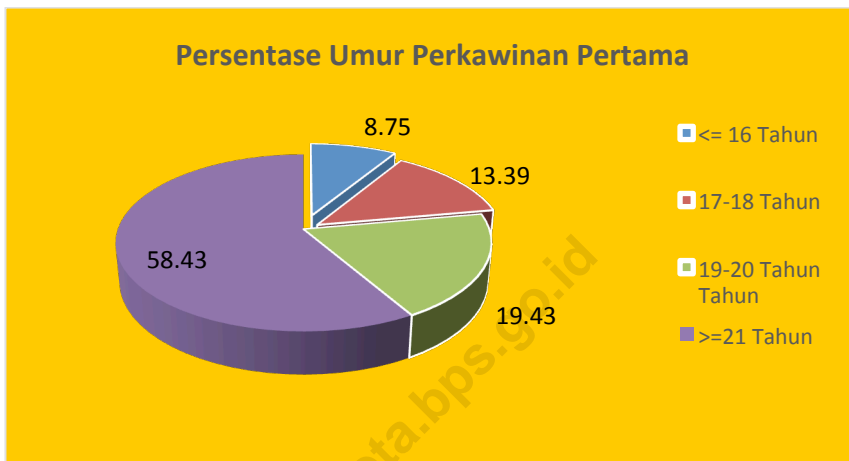
Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menekan tingkat fertilitas, yaitu melalui pembatasan dan penjarangan kelahiran. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur untuk ikut berperan aktif dalam gerakan keluarga berencana. Gerakan ini bukan sekedar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Himbauan untuk menunda usia perkawinan pertama dan membatasi jumlah kelahiran merupakan usaha nyata dalam merealisasikan tujuan tersebut.

3.1. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak.

Perkawinan yang dilakukan pada usia matang (lebih dari 20 tahun) bagi perempuan akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan. Sementara persalinan yang dilakukan pada ibu usia kurang dari 20 tahun, lebih dari 35 tahun, pernah hamil empat kali/lebih, atau jarak waktu kelahiran terakhir kurang dari dua tahun akan semakin memperbesar resiko persalinan.

Grafik 3
Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas Menurut
Umur Perkawinan Pertama di Kota Makassar Tahun 2018



Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin melakukan perkawinan pertama di usia antara 17-18 tahun yaitu sebesar 13,39 persen, usia 19-20 tahun sebesar 19,43 persen dan sebesar 54,25 persen menikah pada usia 21 tahun ke atas. Di Kota Makassar masih ada wanita yang menikah di usia 16 tahun ke bawah, yaitu sebesar 8,75 persen.

Fenomena ini patut menjadi perhatian yang serius mengingat masih banyaknya masyarakat yang menikahkan anak gadisnya dibawah 17 tahun. Faktor budaya yang tercermin dari sikap sebahagian orangtua yang merasa takut anaknya menjadi perawan tua, pemahaman yang masih rendah tentang lembaga perkawinan, juga adanya globalisasi yang menyebabkan akses dunia hiburan yang tak terkontrol dan faktor pergaulan yang bebas merupakan faktor penyebab masih banyaknya penduduk yang menikah pada usia dini.

3.2. Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup

Fertilitas merupakan komponen demografi yang bersifat menambah jumlah penduduk secara alami. Karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang melahirkan anak. Jika tingkat fertilitas tidak bisa dikendalikan maka ledakan jumlah penduduk akan terjadi yang pada gilirannya hal ini akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan.

Tingkat fertilitas ditunjukkan oleh data jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita pernah kawin. Jika dilihat dari jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita pernah kawin, nampak bahwa jumlah anak yang dilahirkan sebagian besar wanita pernah kawin di tahun 2017 adalah 2 orang anak dengan persentase sebesar 27,72 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2016. Pada table 3.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah anak lahir hidup 0-2 tahun meningkat sedangkan jumlah anak lahir hidup 3-5+ mengalami penurunan disbanding tahun 2016.

Tabel 3.1

Persentase Wanita Usia 10 tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) di Kota Makassar 2016 - 2017

Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH)	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)
0	9,89	13,95
1	19,02	21,89
2	30,38	27,72
3	22,17	19,92
4	10,44	9,20
5+	8,09	7,31

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016 - 2017

Indikasi makin meningkatnya partisipasi masyarakat pada gerakan keluarga berencana untuk membatasi atau menjarangkan kelahiran salah satunya dengan program KB yang bertujuan selain menurunkan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 3.3 menyajikan keikutsertaan wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Selama kurun waktu 2017-2018, persentase penduduk yang sedang ikut menggunakan alat/cara KB mengalami peningkatan yakni dari 33,95 persen di tahun 2017 menjadi 45,18 persen di tahun 2018.

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Menikah menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2017 - 2018

Tahun	Pengguna/Memakai alat/Cara KB		
	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	33,95	22,26	43,79
2018	45,18	16,15	38,67

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2017-2018

Tabel 3.3 menyajikan persentase wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut jenis alat/cara KB yang sedang digunakan. Alat kontrasepsi yang paling digemari oleh sebagian besar wanita yang berstatus kawin adalah KB Suntikan mencapai 36,33 persen, diikuti oleh KB lainnya sebesar 30,86 persen, dan KB pil sebesar 17,20 persen.

Banyaknya akseptor yang menggunakan KB suntikan bisa disebabkan karena alat/cara ini relatif lebih praktis dan mudah dilakukan begitu juga dalam hal pemberhentian bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Sementara itu, untuk penggunaan pil KB, hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa jenis kontrasepsi Pil KB pada dasarnya memiliki tingkat

efektifitas tinggi untuk mencegah kehamilan. Akan tetapi, agak sulit dalam pemakaiannya karena faktor kesalahan manusia yang sering terjadi lupa minum pil KB.

Tabel 3.3
 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2016 - 2017

Jenis Kontrasepsi	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(5)	(3)
MOW/MOP	3,32	1,38
AKDR/IUD	9,16	8,45
Suntikan	50,22	36,33
Susuk	5,05	5,78
Pil	17,94	17,20
Lainnya	14,31	30,86

Sumber : BPS Kota Makassar ,Susenas 2017-2018

BAB IV KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata.

Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase persalinan ditolong tenaga medis, persentase bayi/balita diberi ASI, persentase keluhan kesehatan, dan jumlah hari sakit.

4.1. Status Kesehatan Masyarakat

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventatif. Pola hidup tersebut juga sangat tergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain pemenuhan kebutuhan semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

4.2. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh.

Tabel 4.1 dari data Hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 27,90 persen, naik jika dibandingkan tahun 2017 yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 22,90 persen. Hal ini berarti masyarakat harus lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan lebih baik lagi.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2016 - 2017

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki + Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	21,29	24,47	22,90
2018	26,35	29,43	27,90

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2017 - 2018

4.3. Lama Hari Sakit

Lama hari sakit dihitung menurut lama mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sedangkan jumlah hari sakit menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu, juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita. Semakin banyak jumlah hari sakit semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami.

Hasil Susenas 2017 di Kota Makassar menunjukkan bahwa dari semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang paling banyak adalah mereka yang mengalami keluhan kurang dari 4 hari yaitu sekitar 57,70 persen pada tahun 2017. Jumlah hari sakit 4-7 hari sekitar 30,46 persen, 8-14 hari sekitar 3,89 persen, 15-

21 hari sakit sebesar 3,17 persen, sedangkan yang mengalami keluhan kesehatan lebih 22-30 hari sebanyak 4,78 persen. Sebagian besar mengalami penurunan persentase hari sakit kecuali hari sakit kurang dari 4 hari naik sebesar 6,93 persen dan jumlah hari sakit 22-30 hari mengalami kenaikan sebesar 1,57 persen dibandingkan tahun 2016.

Tabel 4.2
 Persentase Penduduk Penderita Sakit menurut Jumlah Hari Sakit
 di Kota Makassar, 2017

Jumlah Hari Sakit	2017		
	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)
< 4	55,06	59,96	57,70
4 - 7	33,43	27,91	30,46
8 - 14	3,60	4,13	3,89
15 - 21	4,64	1,91	3,17
22 - 30	3,26	6,10	4,78

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2017

4.4. Penolong Persalinan

Penolong persalinan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan/ kesehatan bayi dan ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan diyakini lebih baik dibandingkan tenaga non medis.

Penolong persalinan dapat dijadikan indikator bidang kesehatan terutama dalam kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak serta mutu pelayanan kesehatan secara umum. Tempat persalinan yang khusus disertai dengan peralatan yang baik dan ditolong oleh petugas yang terampil, diperkirakan akan lebih baik bila dibandingkan dengan tempat bersalin di rumah, dengan peralatan sederhana dan ditolong oleh tenaga non medis.

Tabel 4.3

Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut Penolong kelahiran anak yang terakhir di Kota Makassar 2016–2017

Tahun	Penolong persalinan Terakhir	
	Dokter Kandungan/ Dokter Umum	Bidan/ Paramedis/Lainnya
(1)	(2)	(3)
2016	52,87	47,13
2017	68,06	31,94

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016–2017

Penolong persalinan di Kota Makassar selama kurun waktu 2016 – 2017 dengan pemanfaatan tenaga dokter sebagai penolong persalinan mengalami peningkatan menjadi 68,06 persen pada tahun 2017 dibanding tahun 2016, sedangkan pemanfaatan tenaga bidan, paramedis dan lainnya mengalami penurunan dari 47,13 persen pada tahun 2016 menjadi 31,94 persen di tahun 2017. Pada tahun 2017, penolong persalinan di Kota Makassar hanya dilakukan oleh dokter kandungan, dokter umum, dan bidan. Hal ini menunjukkan bahwa akses kesehatan di kota Makassar sudah cukup baik.

4.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Sekarang ini pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan pemanfaatan air susu ibu (ASI) bagi balita. Hal ini dikarenakan dalam pertumbuhan dan perkembangan balita sangat memerlukan air susu ibu (ASI). ASI merupakan zat makanan yang paling ideal untuk pertumbuhan bayi sebab selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh. Pemberian ASI kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit.

Pemberian ASI merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran ibu terhadap kesehatan anak. Tabel 4.4 memperlihatkan persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lamanya disusui di Kota Makassar.

Jika dilihat dari lamanya disusui pada balita (Tabel 4.4), nampak selama tahun 2017 persentase anak Usia 2- 4 tahun yang pernah disusui masih cukup tinggi yaitu sebesar 93,41 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya ASI bagi bayi.

Di Kota Makassar tahun 2017, persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lama disusui antara umur 1-12 bulan yaitu sekitar 66,10 persen, kemudian lamanya disusui umur 12-15 bulan sekitar 18,38 persen, lama disusui 16-19 bulan sekitar 8,20 persen, lama disusui 20-23 bulan sekitar 7,31 persen. Terlihat dari tabel 4.4 bahwa persentase bayi berusia dibawah 2 tahun yang paling banyak disusui yang berusia dibawah 1 tahun (12bulan) dan semakin bertambah usianya persentasenya semakin menurun dan paling sedikit di kelompok bayi berusia 20-23 bulan yang kemungkinan dibantu dengan susu formula.

Tabel 4.4

Persentase Anak Berusia Kurang dari 2 tahun yang pernah Disusui Menurut Lama Disusui Kota Makassar 2017

Lama Disusui (Bulan)	2016			2017		
	L(%)	P(%)	L+ P(%)	L(%)	P(%)	L+ P (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
< 12	64,17	62,16	63.20	64,92	67,94	66,10
12-15	17,91	29,43	23.46	23,11	11,05	18,38
16-19	6,89	2,31	4.69	7,39	9,46	8,20
20-23	11,02	6,10	8.65	4,58	11,55	7,31

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2016–2017

4.6. Sarana Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang

biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya.

Fasilitas layanan kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

Tabel 4.5

Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2018

Sarana Kesehatan	2018
(1)	(2)
1. Rumah Sakit	25
2. RS. Bersalin/RSIA	24
3. Puskesmas	46
5. Balai pengobatan/ klinik	182
6. Posyandu	1010

Sumber : Dinkes Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2018)

BAB V

PENDIDIKAN

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan sosial ekonomi bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam empat strategi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah, penambahan tenaga pengajar. Relevansi pendidikan melalui konsep “link and match”, yaitu relevansi strategi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan hendaknya menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai tuntutan zaman. Dan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan supaya pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan keadaan bidang pendidikan secara umum di Kota Makassar diantaranya adalah kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaan sarana pendidikan.

5.1. Sarana Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Ketersediaan sarana pendidikan yang paling dasar dapat ditunjukkan melalui indikator rasio murid-guru dan rasio murid-

sekolah. Meski memiliki kelemahan, yakni indikator bersifat kuantitatif bukan kualitatif, perubahan yang terjadi dalam indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan sarana pendidikan.

5.2. Rasio Murid Guru

Rasio murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Kelihatannya ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru dengan mudah memantau murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang rasio murid guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Tabel 5.1
Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid- Guru		
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/Sederajat	21	22	20
S M P/ sederajat	18	18	17
S MA/Sederajat	16	17	17

Sumber :Data Dapodikdasmn Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2018)

Tabel 5.1 secara umum rasio murid terhadap guru (RMG) menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas sudah semakin baik. Rasio murid guru pada jenjang pendidikan SD/sederajat pada tahun ajaran 2018/2019 yaitu 20 yang menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 20 murid. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SMP /sederajat sekitar 17 yang berarti terdapat sekitar 17 murid diajar oleh seorang guru. Sementara itu, RMG pada jenjang pendidikan SMA/sederajat sekitar 17 atau terdapat sekitar 17 murid diajar oleh seorang guru.

5.3. Rasio Murid Sekolah

Rasio murid sekolah (RMS) pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio murid sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat layak tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Rasio murid sekolah (RMS) untuk semua jenjang pendidikan sekolah di Kota Makassar pada tahun ajaran 2018/2019 menunjukkan angka yang tinggi dibanding tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2018/2019 RMS pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 289 murid per sekolah kemudian untuk jenjang SMP/ sederajat sebanyak 315 murid per sekolah dan untuk rasio murid sekolah pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 305 murid/ siswa setiap sekolah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid- Sekolah		
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/ Sederajat	299	267	289
S M P/ Sederajat	321	290	315
S M A/ Sederajat	307	306	305

Sumber :Makassar Dalam Angka 2019

Rentang rasio murid sekolah tingkat SD berada pada kisaran terendah 195 di Kecamatan Mariso hingga tertinggi 318 di kecamatan Biringkanaya. Sedangkan pada tingkat SMP, rasio murid sekolah terendah 132 di kecamatan Makassar dan tertinggi 639 di kecamatan Biringkanaya. Pada tingkat SMA, rasio murid sekolah terendah 158 di kecamatan Makassar dan tertinggi 504 di kecamatan Tallo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.3 dan 5.4

Tabel 5.3

Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2018

Kecamatan	SD		SMP		SMA/SMK	
	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Mariso	195	17	592	35	433	18
02. Mamajang	268	17	470	21	260	15
03. Tamalate	276	18	425	19	283	24
04. Rappocini	252	18	264	16	214	11
05. Makassar	234	20	132	13	158	14
06. UjungPandang	251	18	284	16	368	19
07. Wajo	217	19	310	20	248	19
08. Bontoala	226	21	170	19	319	17
09. Ujung Tanah	254	23	255	19	328	19
10. Tallo	275	23	336	19	504	21
11. Panakkukang	178	17	207	16	292	16
12. Manggala	148	9	409	19	187	11
13. Biringkaya	318	23	639	17	436	18
14. Tamalanrea	308	21	299	16	283	17
Jumlah	289	20	316	15	305	17

Sumber : Makassar Dalam Angka 2019

Tabel 5.4
Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2018

Kecamatan	SD			SMP			SMA/SMK		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Mariso	23	4.376	266	6	3.554	101	7	3.028	164
02. Mamajang	27	7.237	425	9	4.230	204	15	3.902	261
03. Tamalate	49	13.541	759	15	6.374	339	26	7.365	307
04. Rappocini	51	12.887	725	21	5.541	356	27	5.780	512
05. Makassar	41	9.630	488	19	2.517	198	17	2.690	186
06. Ujung Pandang	32	8.034	468	19	5.389	339	13	4.781	253
07. Wajo	13	2.827	151	5	1.548	78	5	1.240	65
08. Bontoala	23	5.194	249	14	2.381	126	14	4.461	263
09. Ujung Tanah	21	5.337	232	11	2.800	145	6	1.965	102
10. Tallo	49	13.469	578	14	4.708	246	8	4.034	196
11. Panakkukang	74	13.190	726	19	3.929	239	19	5.545	348
12. Manggala	44	6.490	728	17	6.952	367	19	3.562	336
13. Biringkaya	58	18.450	813	15	9.580	578	21	9.154	509
14. Tamalanrea	36	11.105	526	15	4.486	288	14	3.962	240
J u m l a h	541	156.741	5.371	199	62.804	4.093	215	65.667	3.875

Sumber : Makassar Dalam Angka 2019

Tingginya rasio murid sekolah, seyogyanya dapat diantisipasi dengan memperbanyak sarana dan fasilitas ruang kelas di masing-masing sekolah. Demikian juga dengan ketersediaan tenaga pengajar di tingkat SD utamanya daerah-daerah terpencil dan daerah sulit, sangat perlu dilakukan penambahan dan redistribusi sehingga diperoleh keseimbangan rasio murid guru. Namun untuk tingkat SMP dan SMA rasio murid guru sudah baik. Dengan demikian harapan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dicapai.

5.4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diimplentasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah yang disajikan dalam bab ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.5
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun Kota Makassar 2017 – 2018

Jenis Kelamin	2017			2018		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	98.85	92.41	75.68	99.21	91.84	69.02
Perempuan	98.18	91.71	71.89	99.28	92.70	74.33
Laki-laki + Perempuan	98.29	92.05	74.06	99.24	92.25	71.91

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017– 2018

Tabel 5.5 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun di Kota Makassar. Tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil partisipasi sekolahnya. Keadaan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi sekolah dari penduduk usia 7-12 tahun di tahun 2018 mencapai 99,24 persen, ini dapat diartikan dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 99 penduduk yang masih aktif bersekolah. Untuk penduduk usia ini, partisipasi sekolah penduduk perempuan besar dari pada laki-laki yaitu sekitar 99,21 persen laki-laki dan perempuan sekitar 99,28 persen.

Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolahnya lebih rendah dari partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Partisipasi sekolah pada

kelompok ini mencapai sekitar 92,25 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu 92,70 persen untuk perempuan dan 91,84 persen untuk laki-laki.

Pada kelompok umur 16-18 tahun, partisipasi sekolahnya juga nampak lebih rendah dibandingkan pada kelompok umur 13-15 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai 71,91 persen. Angka Partisipasi penduduk perempuan sebesar 74,33 persen, sedangkan partisipasi penduduk laki-laki sebesar 69,02 persen.

Pada table 5.5 kita bisa melihat bahwa partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun diatas 90%. Tingginya angka partisipasi sekolah pada kelompok ini salah satunya disebabkan adanya program pendidikan gratis pada usia SD dan SMP yang sebagian besarnya berada dalam usia 7-12 dan 13-15 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun angka partisipasinya hanya berkisar pada angka 70-an persen.

5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf)

Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk penduduk yang berumur 10 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator ketertinggalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kepandaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan indikator dasar mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang

dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makasar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Tabel 5.6 menunjukkan tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Secara umum, selama kurun 2017 – 2018 kemampuan dapat membaca dan menulis penduduk menurun. Hal itu ditandai dengan menurunnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya serta menurunnya angka buta huruf. Tahun 2018 sekitar 97,67 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, atau turun sekitar 1,19 persen dari keadaan tahun 2017 yang mencapai 98,86 persen.

Telaah lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan lebih rendah dibanding penduduk laki-laki. Penduduk perempuan yang bisa membaca dan menulis sebesar 97,31 persen tahun 2018 dan penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis sekitar 98,05 persen. Masih adanya penduduk yang buta huruf sebesar 2,33 persen. Penduduk yang buta huruf kemungkinan terjadi pada usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Masih adanya penduduk yang buta huruf perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar kualitas pendidikan lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 5.6
Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar
2017-2018

Jenis Kelamin	2017		2018	
	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Laki-Laki	99.37	0.63	98.05	1.95
Perempuan	98.36	1.64	97,31	2.69
Laki-laki + Perempuan	98.86	1.14	97,67	2.33

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 – 2018

5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

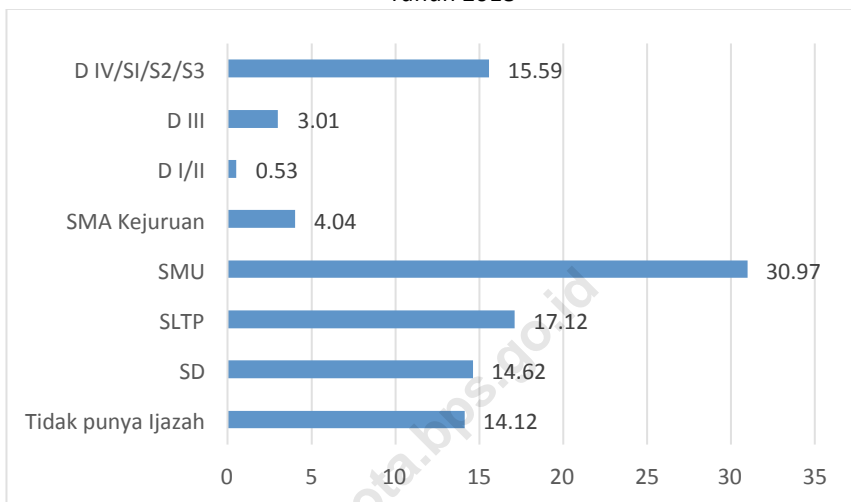
Tabel 5.7 memperlihatkan penduduk Kota Makassar usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2018. Bahwa sebagai ibukota propinsi, Makassar merupakan pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, memungkinkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dengan lebih mudah. Pada tahun 2018 sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun keatas berijazah SD, SLTP, SMA umum SMA Kejuruan masing-masing sebesar 14,62 persen; 17,12 persen; 30,97 persen dan 4,04 persen. Sementara penduduk Kota Makassar yang berijazah DIV/S1/S2/S3 sebesar 15,59 persen. Selengkapnya pada Tabel 5.7 dibawah ini.

Tabel 5.7
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2018

Pendidikan Yang Ditamatkan	2018		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya Ijazah	12,29	15,87	14,12
SD	15,16	14,11	14.62
SLTP	16,60	17.62	17.12
SMU	31,92	30,07	30,97
SMA Kejuruan	5.16	2,96	4.04
D I/II	0.61	0,45	0,53
D III	2,29	3.69	3,01
D IV/SI/S2/S3	15,96	15.23	15,59

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018

Grafik 4
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2018



BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenaga kerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauhmana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Secara internasional berdasarkan konsep dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja (Man Power), sedangkan di Indonesia menggolongkan penduduk usia 15 tahun keatas sebagai tenaga kerja. Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

Melalui konsep Labour Force Approach dari bagian penduduk, tenaga kerja dapat dogolongkan mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja (untuk meghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum (sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah pengangguran tetapi juga sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal berbagai indikator seperti tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha.

6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 6.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama selama seminggu yang lalu di Kota Makassar tahun 2018. Tabel ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk angkatan kerja ada sebanyak 52,22 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dan sebanyak 7,26 persen yang sedang mencari pekerjaan. Dibanding tahun 2017 angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 1,54 persen.

Tabel 6.1
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu
Yang Lalu, Di Kota Makassar, 2017 dan 2018

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	49,38	5,85	12,53	27,24	5,00
2018	52,22	7,26	14,07	21,52	4,93

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2017 dan 2018

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 6.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas Di Kota Makassar 2017 dan 2018

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	72,90	38,28	9,57	12,45
2018	73,97	45,56	12,22	12,15

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2017 dan 2018

Dari tabel 6.2 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2017 dan 2018. Pada rentang waktu tersebut menunjukkan trend peningkatan TPAK baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2018 TPAK penduduk laki-laki Kota Makassar sebesar 73,97 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 73 orang penduduk laki-laki yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 45,56

Seperti di negara-negara berkembang, pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh tidak terserapnya sebagian angkatan kerja dalam sektor kegiatan ekonomi (lapangan pekerjaan). Dengan kata lain pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Sehingga sangat diperlukan data mengenai pencari pekerjaan sebagai bahan untuk pertimbangan mengenai masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, dapat diartikan pula sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tingkat pengangguran pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 TPT laki-laki naik sebesar 2,65 persen dibanding tahun 2017, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,30 persen. Kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini turut mempengaruhi angka TPAK dan TPT

di Kota Makassar, sehingga masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan

Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. hal ini penting untuk mengetahui sektor usaha mana saja yang menyerap tenaga kerja paling banyak.

Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota Makassar terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2018, sektor perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel menyerap tenaga kerja sebesar 208.221 orang di kota Makassar dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 141.571 pekerja. Selama tahun 2018 alokasi lapangan usaha sebagai tanda aktifitas ekonomi di Kota Makassar nampak terjadi pergeseran, meski sektor perdagangan dan jasa masih mendominasi. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen tenaga kerja di Makassar terserap pada kedua sektor tersebut.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Makassar 2018

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	2018		
	L (2)	P (3)	L+P (4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan perikanan	15.479	2.573	18.052
Industri Pengolahan	38.039	22.021	60.060
Perdagangan Besar, Eceran, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	88.445	119.776	208.221
Lainnya *)	140.666	20.651	161.317

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2018

Catatan: Lainnya*) Pertambangan dan Penggalian, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

Tabel 6.4
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar, 2018

Jenis Pekerjaan	2018		
	L	P	L+P
(1)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Profesional	20.290	7.428	27.718
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	23.645	30.519	54.164
Tenaga Tata Usaha dan sejenisnya	22.531	8.379	30.910
Tenaga Usaha Penjualan	33.361	29.512	62.873
Tenaga Usaha Jasa	91.507	112.607	204.114
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	10.922	1.820	12.742
Tenaga Produksi, Operator alat-alat angkutan dan Pekerja Kasar	156.752	39.948	196.700

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2018

Berdasarkan tabel 6.4 terjadi pergeseran usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di Kota Makassar pada tahun 2018. Pada tahun 2018, 3 jenis pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah jenis pekerjaan jenis pekerjaan tenaga usaha jasa sebesar 204.114 pekerja; tenaga produksi, operator alat-alat berat yaitu sebesar 196.700 pekerja; dan tenaga usaha penjualan sebanyak 62.873 tenaga kerja.

6.4. Status Pekerjaan

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan adalah status pekerjaan penduduk, yakni kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori, yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Status pekerjaan ini dapat dijadikan petunjuk

untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal. Indikasi berkembangnya sektor informal dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan pekerja bebas.

Pada Tabel 6.5 berikut ini, memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2018, status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai masih mendominasi status pekerjaan utama penduduk Kota Makassar. Dari 589.221 penduduk 15 Tahun Kota Makassar yang bekerja, sebanyak 355.520 (60,33 %) yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Terbanyak kedua adalah status pekerjaan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebanyak 120.322 (20,42 %). Selebihnya, sebanyak 19,25 persen penduduk 15 tahun keatas Kota Makassar pada tahun 2018 ini bekerja dengan status pekerjaan utamanya adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja bebas dan pekerja yang tidak dibayar.

Tabel 6.5
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar, 2018

Status Pekerjaan Utama	2018		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	63.785	56.537	120.322
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	10.245	15.738	25.983
Berusaha dibantu buruh tetap	21.811	5.859	27.670
Buruh/karyawan/pegawai	222.063	133.457	355.520
Pekerja bebas di pertanian	2.494	-	2.494
Pekerja bebas di non pertanian	30.934	9	30.943
Pekerja tak dibayar	7.676	18.613	26.289
Jumlah	359.008	230.213	589.221

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2018

6.5. Lama Jam Bekerja

Salah satu ukuran untuk menentukan bagaimana produktifitas pekerja dan ukuran setengah pengangguran dan tenaga kerja penuh adalah jumlah jam bekerja yang digunakan pekerja untuk bekerja dalam seminggu. Batasan yang biasanya dipakai untuk mengukur jam kerja adalah lebih 35 jam/minggu, artinya jika yang bekerja kurang dari jam kerja normal dikatakan sebagai pekerja penganggur/setengah bekerja. Pada tabel 6.6 tampak bahwa 488.575 orang penduduk Kota Makassar yang bekerja selama 35 jam keatas dalam seminggu yakni 312.103 orang laki-laki dan 176.472 orang perempuan pada tahun 2018.

Tabel 6.6
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar, 2018

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	2018		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
0 ^{*)}	8.576	5.103	13.679
1 – 14	6.163	13.752	19.915
15 – 34	32.166	34.886	67.052
35 +	312.103	176.472	488.575
Jumlah	359.008	230.213	589.221

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2018

Keterangan : ^{*)} sementara tidak bekerja

BAB VII

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas tetapi juga mengenai kualitas rumah. Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak sehat juga akan berpengaruh terhadap kesehatan.

7.1. Status Penguasaan Rumah

Indikator ini memperlihatkan status penguasaan rumah yang dibedakan atas milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. Pada umumnya rumahtangga yang memiliki tempat tinggal sendiri, diperkirakan tingkat kesejahteraannya lebih baik, dibanding mereka yang masih kontrak, sewa atau lainnya. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menempati tempat tinggal sendiri disuatu daerah, akan semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Tabel 7.1 memperlihatkan status penguasaan bangunan tempat tinggal oleh rumahtangga di Kota Makassar pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2018, penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri sebesar 57,60

persen, kontrak/sewa sebesar 16,99 persen dan bebas sewa/dinas/lainnya sebesar 25,41 persen.

Penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri oleh rumahtangga dipengaruhi beberapa faktor antara lain; keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yaitu rendahnya pendapatan, alasan pendidikan, lokasi tempat kerja dan memilih tinggal bersama keluarga/sanak saudara.

Tabel 7.1
Rumah tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kota
Makassar, 2017– 2018

Status Penguasaan	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	56,65	57,60
Kontrak/Sewa	23,78	16,99
Bebas Sewa/Dinas/Lainnya	19,57	25,41

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017– 2018

7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal

Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Luas lantai dan jenis bahan bangunannya, merupakan unsur penting dalam menciptakan kondisi kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Diperkirakan semakin luas lantai hunian dan semakin baik kualitas bahan bangunan yang digunakan akan menciptakan kondisi, yang semakin nyaman dan sehat bagi penghuninya.

Rata-rata luas lantai per anggota rumahtangga akan memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan suatu rumah bagi penghuninya. Jika rata-rata anggota rumahtangga di Kota Makassar berkisar antara 4 sampai 5 orang, dan standar normatif luas lantai perkapita seluas 8 m² maka luas lantai hunian yang diharapkan setiap rumahtangga adalah berkisar antara 32 – 40 m².

Keadaan rumahtangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal selama tahun 2017 menunjukkan bahwa rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi sekitar 8,45 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m² sekitar 24,99 persen. Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 50-99 m², mencapai 34,77 persen, sedangkan rumahtangga dengan luas lantai diatas 100 m² keatas mencapai 31,79 persen.

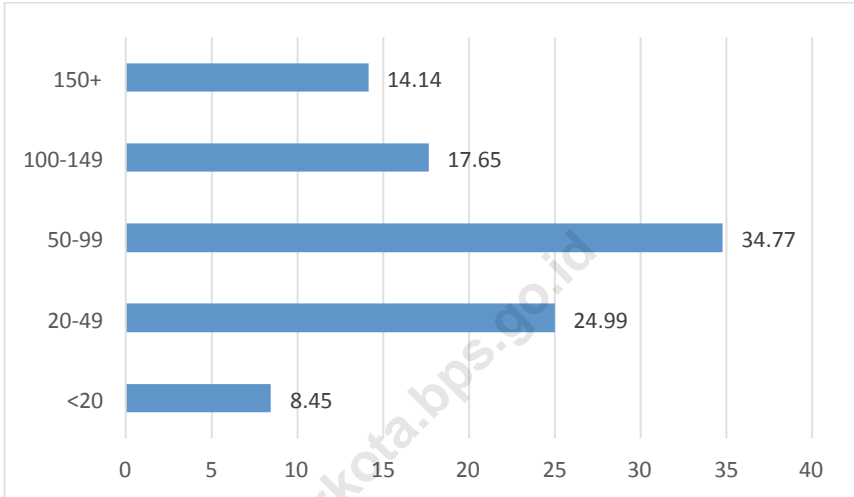
Dengan melihat kondisi luas lantai bangunan tempat tinggal di kota Makassar, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Makassar menempati rumah dengan luas lantai diatas 50 M². Dengan rata-rata anggota 4-5 orang per rumah tangga, maka bisa dikatakan bahwa diatas 50 persen penduduk Kota Makassar memiliki kenyamanan rumah dilihat dari luas lantai bangunannya.

Tabel 7.2
 Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar
 Tahun 2017 dan 2018

Luas Lantai	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
- < 20	11,92	8,45
- 20 – 49	22,42	24,99
- 50 – 99	33,42	34,77
- 100 – 149	14,41	17,65
- 150 +	17,83	14,14

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 dan 2018

Grafik 5
Persentase Rumah tangga Menurut Luas Lantai Kota Makassar
Tahun 2018



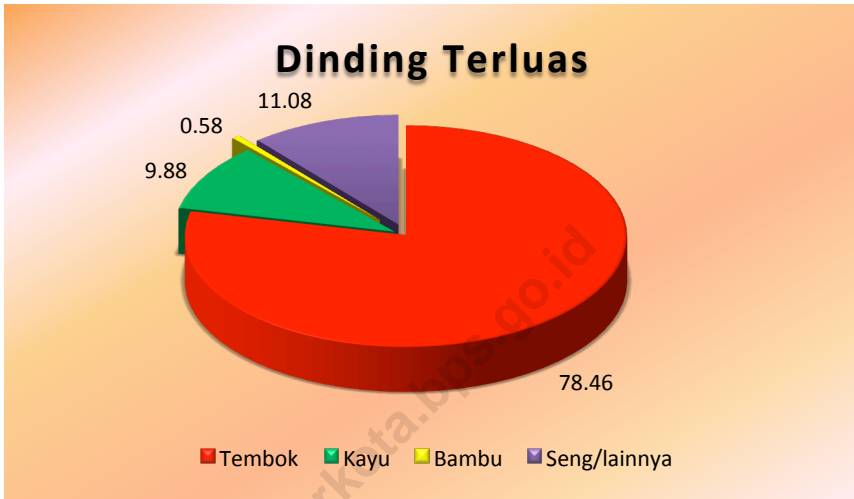
Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018

Tabel 7.3
Persentase Rumah tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Makassar
Tahun 2017-2018

Jenis Dinding	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
- Tembok	82,67	78,46
- Kayu	9,47	9,88
- Bambu	0,36	0,58
- Seng/Lainnya	-	11,08

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018

Grafik 6
Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar Tahun 2018



Keadaan rumahtangga menurut dinding terluas tahun 2017 dan 2018 disajikan pada tabel 7.3. Pada tabel ini jenis dinding terluas dibagi dalam empat kelompok, yaitu jenis dinding tembok, kayu, bambu dan lainnya. Tabel 7.3 menunjukkan sebagian besar jenis dinding terluas yang dihuni oleh rumah tangga sudah berupa tembok, yaitu sebesar 78,46 persen, berupa kayu sebesar 9,88 persen, bambu 0,58 persen dan yang menggunakan seng/selainnya sebesar 11,08 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar dinding terluas di setiap rumahtangga di Kota Makassar sudah merupakan dinding yang permanen karena berupa tembok.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga seseorang yang mendiami terlindung dari terik sinar matahari, hujan dan sebagainya. Untuk jenis bangunan bertingkat, yang dimaksud atap disini adalah bagian yang paling atas dari bangunan tersebut.

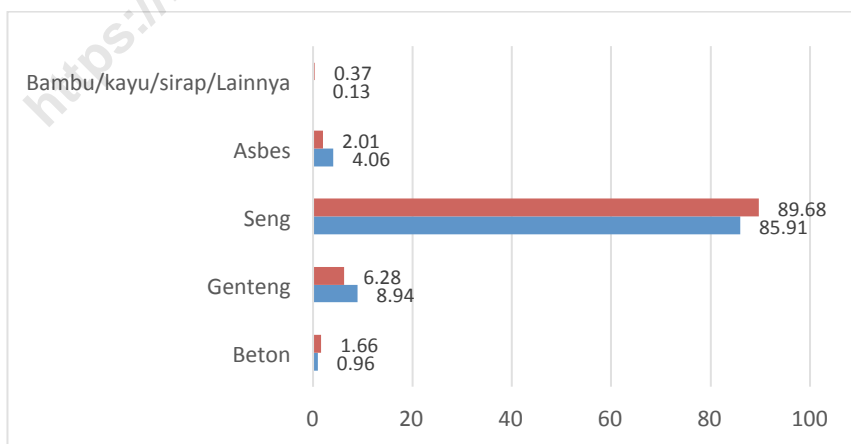
Pada tahun 2018 sebagian besar rumahtangga sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan atap seng sebagai atap terluas, yakni mencapai 89,68 persen naik 3,77 persen dari tahun 2017.

Tabel 7.4
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar
 Tahun 2017 - 2018

Jenis Atap	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
- Beton	0,96	1,66
- Genteng	8,94	6,28
- Seng	85,91	89,68
- Asbes	4,06	2,01
- Bambu/Kayu/Sirap/lainnya	0,13	0,37

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 - 2018

Grafik 7
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun
 2017 dan 2018



Persyaratan lain dari rumah sehat, oleh Depkes adalah lantai rumah harus kering/tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari teraso, ubin/tegel, batu bata, atau plur/semen (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau bambu (untuk rumah panggung).

7.3. Fasilitas Tempat Tinggal

7.3.1. Sumber Air Minum

Kenyamanan tempat tinggal juga tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan, kelayakan dan penggunaan fasilitas tempat tinggal. Air merupakan kebutuhan yang vital, dibutuhkan oleh setiap orang. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci. Sehat atau bersih tidaknya air yang digunakan akan bergantung pada sumbernya. Penggunaan air bersih dan pemilikan fasilitas air minum dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan. Semakin banyak rumahtangga yang memanfaatkan air bersih, menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga. Demikian halnya dengan semakin banyaknya rumahtangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri cenderung semakin baik tingkat kesejahteranya. Air minum yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah yang bersumber dari ledeng. Karena sebelum air didistribusikan ke rumah penduduk terlebih dahulu dilakukan proses penjernihan. Selain itu yang termasuk kategori air bersih adalah air yang bersumber dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Kebutuhan akan air bersih, terutama untuk bahan baku air yang berkualitas, bila ditinjau dari segi kesehatan dirasakan semakin hari semakin penting. Ini mengingat semakin tingginya permintaan akan air bersih oleh rumahtangga, yang tidak dapat diimbangi penyediaannya oleh alam secara memadai, mengingat daya dukung sumber daya yang terbatas.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat sumber air minum yang dikonsumsi rumahtangga adalah dengan melihat sumber air minum yang digunakan oleh rumahtangga tersebut.

Rumahtangga di Kota Makassar tahun 2018 yang menggunakan air dalam kemasan/air isi ulang dan Air Ledeng (PDAM) sebagai sumber air minum utama menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber air minum yang paling

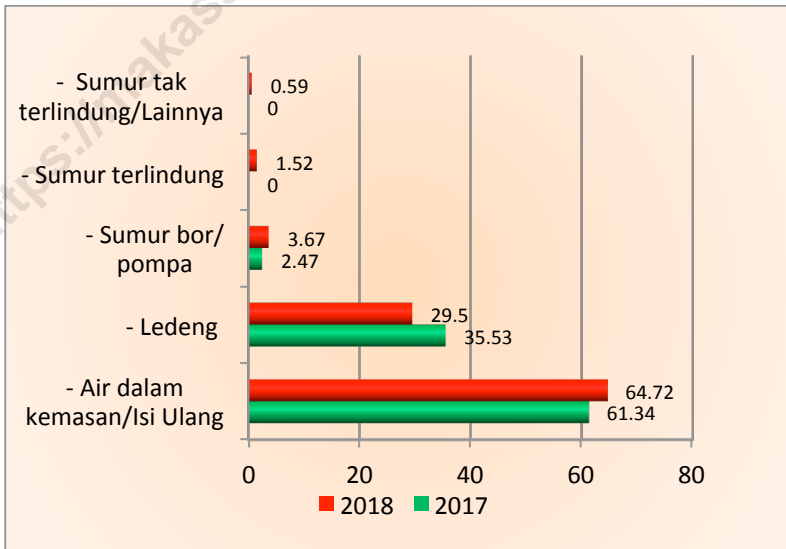
banyak digunakan oleh masyarakat dengan masing-masing persentasenya sebesar 64,72 persen dan 29,50 persen. Sedangkan yang menggunakan air sumur bor/pompa sebagai sumber air minum yaitu sekitar 3,67 persen, air sumur terlindung sekitar 1,52 persen dan sumur tak terlindung sekitar 0,59 persen.

Tabel 7.5
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar
 Tahun 2017-2018

Sumber Air Minum (1)	2017 (3)	2018 (5)
- Air dalam kemasan/Isi Ulang	61,34	64,72
- Ledeng	35,53	29,50
- Sumur bor/pompa	2,47	3,67
- Sumur terlindung	0,62	1,52
- Sumur tak terlindung/Lainnya	0,01	0,59

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017-2018

Grafik 8
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar
 Tahun 2017 dan 2018



7.3.2. Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting, karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Dari tabel 7.6 dapat dilihat bahwa persentase rumahtangga dalam menggunakan tempat buang air besar dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumahtangga itu sendiri tahun 2018 sebesar 83,66 persen.

Tabel 7.6
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat
Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota
Makassar Tahun 2017- 2018

Fasilitas Tempat Tinggal	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
Fasilitas Tempat BAB		
- Sendiri	83,69	83,66
- Bersama/Komunal	13,76	10,12
- Umum	1,87	5,01
- Tidak ada	0,68	1,20
Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
- Tangki/SPAL	98,97	98,91
- IPAL	0,38	0,15
- Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	0,51	0,67
- Lubang Tanah/ Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	0,14	0,27

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 dan 2018

7.3.3. Fasilitas Penerangan

Fasilitas listrik juga banyak memberikan efisiensi dan produktivitas pada pemakaian sebagai sumber penerangan. Pada tabel 7.7 untuk sumber penerangan sebagian besar rumahtangga sudah menggunakan listrik tanpa melihat apakah bersumber dari PLN maupun non PLN. Untuk tahun 2018 yaitu sekitar 99,49 persen sudah menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN dan rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan listrik non PLN (Genset) utamanya masyarakat atau rumahtangga yang bertempat tinggal di daerah Pulau yaitu sekitar 0,51 persen.

Tabel 7.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota Makassar
Tahun 2017 dan 2018

Fasilitas Penerangan	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
- Listrik PLN	99,72	99,49
- Listrik non PLN	0,17	0,51
- Pelita/Lainnya	0,11	-

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 dan 2018

Grafik 9
Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar
Tahun 2017 dan 2018



BAB VIII INDIKATOR LAINNYA

Pengeluaran rumahtangga dapat dibedakan menurut pengeluaran makanan dan bukan makanan, dimana menggambarkan bagaimana penduduk Kota Makassar mengalokasikan kebutuhan rumahtangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumahtangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya dilihat dari segi ekonomi.

8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita

Tabel 8.1 menggambarkan perkembangan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita. Terlihat tahun 2018 persentase pengeluaran penduduk perkapita terbesar pada golongan pengeluaran diatas Rp. 1.500.000 yaitu sebesar 42,11 persen dan terendah pada golongan pengeluaran Rp. 200.000 – Rp. 299.999 sebesar 0,89 persen. Dari tabel ini juga tergambar bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran perkapita semakin besar persentase penduduknya.

Tabel 8.1
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kota
Makassar Tahun 2018

No.	Golongan pengeluaran	Persentase Penduduk
1.	< 150.000	-
2.	150.000 – 199.999	0.89
3.	200.000 – 299.999	2.57
4.	300.000 – 499.999	9.14
5.	500.000 – 749.999	12.19
6.	750.000 – 999.999	12.63
7.	1.000.000 – 1.499.999	20.47
8.	1.500.000 +	42.11
	JUMLAH	100,00

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2018

Pengeluaran perkapita sebulan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 8.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengeluaran rata-rata sebulan penduduk Kota Makassar pada tahun 2018 menurut pengeluaran makanan sebesar Rp 689.416,- dan non makanan sebesar Rp 886.687,- tahun 2018.

Tabel 8.2

Pengeluaran perkapita sebulan dan pola konsumsi di Kota Makassar 2017-2018

Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)				Pola konsumsi penduduk (%)			
Makanan		Non Makanan		Makanan		Non Makanan	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
613.354	689.416	922.663	886.687	39,93	43,74	60,07	56,26

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2017-2018

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 pola konsumsi penduduk untuk makanan pada tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 3.81 poin, yakni 39.93 persen tahun 2017 menjadi 43.74 persen tahun 2018 sedangkan untuk konsumsi non makanan tahun 2017 sebesar 60.07 persen dan mengalami penurunan sebesar 3.81 persen pada tahun 2018 menjadi 56.26 persen.

Jika melihat besarnya pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan dibandingkan non makanan maka dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita penduduk kota Makassar untuk non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat relative lebih baik.

8.2. Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan. Penduduk atau rumahtangga miskin yang mengalami masalah/hambatan untuk dapat hidup secara layak, secara konseptual disebut

sebagai fakir miskin dan digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sesuai dengan definisi yang disepakati fakir miskin adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan

perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan.

Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

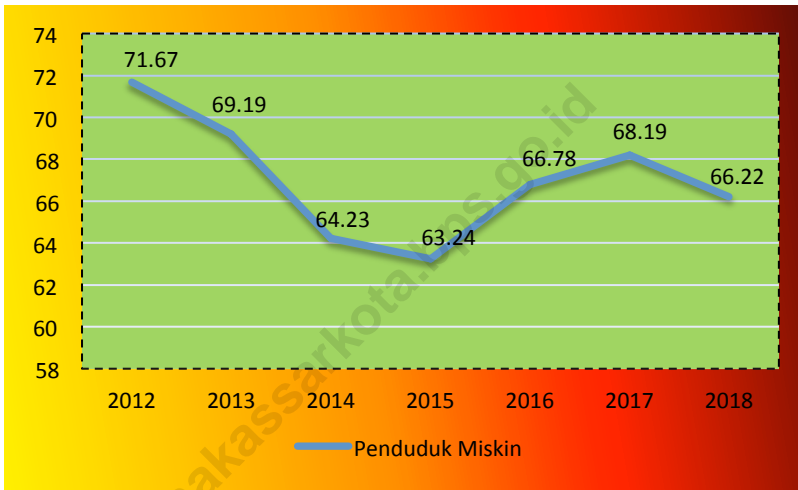
Tabel 8.3
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota Makassar
Tahun 2016– 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Pend.Miskin (000)	66,78	68,19	66,22
Persentase pend.Miskin (%)	4,56	4,59	4,41
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	347.723	366.430	386.545

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2016-2018

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2017, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 68,19 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 66,22 Ribu jiwa.

Grafik 10
Jumlah Penduduk Miskin dan Kota Makassar Tahun 2012-2018 (Ribu Jiwa)



Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir ini dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2012 dan tahun 2018. Analisis ini mencakup jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan mencakup garis kemiskinan, kemiskinan.

8.2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimum yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok non makanan.

Garis kemiskinan penduduk miskin Kota Makassar pada tahun 2018 sebesar Rp. 386.545,-/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini mengalami peningkatan sebesar Rp.20.115,- jika dibandingkan tahun 2017 yang besarnya Rp.366.430/kapita/bulan. Pada table 8.2 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2016-2018 garis kemiskinan penduduk kota Makassar terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini bisa jadi disebabkan karena adanya inflasi sehingga harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan atau bisa juga karena kemampuan penduduk miskin untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok menjadi lebih baik dari sebelumnya.

8.2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2018 sebesar 66,22 ribu jiwa, angka ini mengalami penurunan sebanyak 1,90 ribu jiwa dari tahun 2017, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 68,19 ribu jiwa. Pada grafik 10 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Makassar dalam kurun waktu 2016-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 66,78 ribu jiwa, tahun 2017 meningkat menjadi 68,19 ribu jiwa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 66,22 ribu jiwa.

Tabel 8.2
Jumlah (000) dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kotadi
Sulawesi Selatan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)
(1)	(2)
01. Kep. Selayar	17.59
02. Bulukumba	31.25
03. Bantaeng	17.20
04. Jeneponto	55.95
05. Takalar	26.57
06. Gowa	59.34
07. Sinjai	22.48
08. Maros	35.97
09. Pangkep	50.12
10. Barru	15.68
11. Bone	79.57
12. Soppeng	17.00
13. Wajo	29.73
14. Sidrap	15.41
15. Pinrang	32.94
16. Enrekang	25.53
17. Luwu	47.91
18. Tana Toraja	29.65
22. Luwu Utara	42.43
25. Luwu Timur	21.15
26. Toraja Utara	30.68
71. Makassar	66.22
72. Pare-Pare	8.01
73. Palopo	14.27
Sulawesi Selatan	792.63

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2019), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2018), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, Sul Sel
- BPS , Provinsi Sulawesi Selatan, (2018), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2017), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2018), Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, Sul-Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2018), Indikator Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2018, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2018) Percepatan penyediaan Data Statistik dalam rangka Alokasi Dana Perimbangan Daerah, Penduduk Pertengahan tahun 2010-2018 Provinsi Sulawesi Selatan, 2018
- BPS, Kota Makassar, Makassar Dalam Angka Kota Makassar, 2011-2018, Makassar
- BPS, Kota Makassar, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, 2012-2018, Maakssar